PETUNJUK MEMBUAT MAKALAH

PROSES SENGKETA ANTROPOLOGI HUKUM

Nama Mahasiswa: RAJES FEBRIAN IDRA

Email: rajesfebrian9@gmail.com

No BP:2010003600174

UNIVERSITAS EKASAKTI

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akhir-akhir ini sengketa lahan dan hutan antara masyarakat lokal dengan perusahaan HPH semakin mengemuka dan meluas. Berbagai kajian telah mengungkapkan bahwa permasalahan sengketa lahan hutan muncul sebagai akibat dari pengabaian hak-hak adat masyarakat atas hutan dan hasil hutan oleh perusahaan HPH. Alqadrie (1994: 255) mengemukakan bahwa pendapatan masyarakat lokal di Kalimantan Barat telah mengalami penurunan drastis karena sumber-sumber ekonomi masyarakat dari hutan hilang akibat dari berkurangnya areal hutan dan larangan bagi penduduk setempat untuk mengumpulkan hasil hutan sejak keberadaan perusahaan HPH. Ngo (1996: 147) juga mengemukakan bahwa masyarakat Kayan Mendalam dan Malay Sambus di Kalimantan Barat terus memperjuangkan hak adat mereka atas lahan hutan dan pohon tengkawang yang dimasukkan sebagai areal konsesi HPH, demikian pula sengketa pohon tengkawang antara masyarakat lokal di Sanggau Ledo dan Nanga Pinoh dengan perusahaan HPH dan Perkebunan kelapa sawit.

Keberadaan hak-hak adat atas tanah (lahan) dan hutan berdasarkan hukum adat memang secara empiris dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Ahli hukum adat Indonesia, Ter Haar (1960: 56) mengemukakan:

“Hubungan hidup antara umat manusia yang teratur susunannya dan bertalian satu sama lain disatu pihak dan tanah dilain pihak, yaitu tanah dimana mereka

PETUNJUK MEMBUAT MAKALAH

berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya

beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya ummat itu dan karenanya tergantung dari padanya, maka

pertalian demikian itu yang dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya

“serba berpasangan” (participierend denken) itu dapat dan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum (rechtsbetrekking) ummat manusia terhadap tanah.”

Soepomo (1977: 3), ahli hukum adat Indonesia lainnya, juga menjelaskan bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Van Vollenhoven (dikutip oleh Soepomo, 1977: 11) berpendapat bahwa jikalau dari atas telah diputuskan untuk mempertahankan hukum adat padahal hukum itu sudah mati, maka peraturan-peraturan itu sia-sia belaka. Sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa hukum adat harus diganti, padahal di desa-desa, di ladang-ladang, dan di pasar-pasar hukum itu masih kokoh dan kuat, maka hakim akan sia-sia belaka. Pertentangan antara hukum nasional dan hukum adat maupun upaya menyatukan hukum adat untuk membangun hukum nasional telah menjadi wacana hampir di seluruh negara-negara yang baru merdeka. “Satu hukum adat umum Indonesia tidak ada”, suatu pernyataan yang ditegaskan oleh ahli dan perintis hukum adat Indonesia, van Vollenhoven (1972: 13). Van Vollenhoven menyusun 29 lingkaran hukum adat di Indonesia, yang menunjukkan beraneka warna hukum adat di Indonesia. Namun demikian van Vollenhoven (1972: 13) menyarankan bahwa lebih baik mengusahakan kodifikasi hukum adat dalam garis-garis

PETUNJUK MEMBUAT MAKALAH

besarnya saja sehingga kodifikasi itu dapat berlaku untuk wilayah seluas mungkin, dengan adanya ruang gerak bagi penyimpangan-penyimpangan setempat, yakni aturan-aturan yang khas setempat tetap berlaku.

Keberadaan dan keberlakuan hukum adat pada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa hukum positif formal bukanlah satu-satunya wujud hukum. Dengan demikian pluralisme hukum (legal pluralism) memang sesuatu yang faktual. Dalam situasi sengketa, keberadaan dan keberlakuan pluralisme hukum menjadi lebih nyata.

Fokus kajian ini adalah menyoroti kasus sengketa dengan perspektif antropologi hukum, bagaimana masing-masing pihak yang bersengketa melakukan pilihan hukum dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Sengketa yang disoroti adalah sengketa lahan hutan antara masyarakat lokal dengan perusahaan HPH PT. DRT di Riau.

B. PEMBAHASAN

Pilihan Hukum dan Manipulasi

Dalam kasus sengketa yang dikaji, pihak masyarakat setempat memilih acuan hukum yang berupa “hasil kesepakatan”, yaitu Kesepakatan Tata Batas Kawasan KPHP PT. DRT tahun 1996. Landasan hukum “hasil kesepakatan” relatif tidak kuat bagi masyarakat karena tidak terdapat klausul yang menegaskan bahwa lahan yang dikeluarkan dari areal konsesi dan hasil hutan yang ada di dalamnya menjadi milik masyarakat. Tampaknya terdapat manipulasi informasi antara apa yang diucapkan dengan apa yang tertulis, sehingga menimbulkan pemahaman masyarakat yang tidak sama dengan isi Berita Acara Kesepakatan.

Pihak perusahaan HPH memilih jalur hukum positif yang telah berpihak padanya, yaitu berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan maupun Kepala Kantor Wilayah

PETUNJUK MEMBUAT MAKALAH

Kehutanan. Berita Acara Hasil Kesepakatan juga menjadi acuan hukum karena isinya lebih berpihak kepadanya.

Pilihan Model Penyelesaian Sengketa

Model-model penyelesaian sengketa (modes of settlement) yang lajim digunakan adalah (Nader dan Todd, 1978: x) arbitrase, negosiasi, mediasi, judikasi, paksaan (coercion), dan penghindaran (avoidance). Dalam sengketa antara masyarakat setempat dengan perusahaan PT. DRT/PT. Sindora Seraya, model penyelesaian yang ditempuh adalah kombinasi model negosiasi dan mediasi. Masyarakat meminta bantuan pihak LSM, di lain pihak perusahaan HPH mengandalkan pemerintah sebagai pemegang kewenangan untuk memutuskan. Dalam kasus sengketa ini pemerintah cenderung lebih berpihak dan melindungi perusahaan.

Pilihan model mediasi secara teoritis lebih tepat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, karena sesuai dengan konteksnya baik obyek yang disengketakan, landasan klaim terhadap obyek sengketa, maupun situasi sosial politik yang berkembang. Namun aktor yang berperan dalam proses mediasi tidak memainkan perannya secara tepat, bahkan cenderung berperan sebagai pembela atau pendukung masing-masing aktor yang bersengketa. Respons pemerintah untuk memperhatikan kepentingan masyarakat tidak didasarkan pada perannya sebagai mediator dan pelayanan masyarakat, melainkan karena tekanan oleh LSM. Pemerintah cenderung menjadi pembela perusahaan HPH. Demikian pula keberadaan LSM tidak berperan sebagai mediator, melainkan berperan sebagai pembela masyarakat. Sehingga yang terjadi adalah pembentukan dua kutub aktor bersengketa, yaitu di satu pihak masyarakat dan kalangan LSM berhadapan dengan perusahaan HPH dan pemerintah di lain pihak.

PETUNJUK MEMBUAT MAKALAH

Gejala yang berkembang dalam proses penyelesaian sengketa tidak mengarah pada inisiatif penemuan pokok-pokok kepentingan (the main interests) masing-masing pihak, melainkan peningkatan kekuatan dan inisiatif strategi baru. Proses negosiasi antara masyarakat dan LSM di satu pihak dengan perusahaan HPH dan pemerintah di lain pihak tidak menempuh jalan (1) berfokus pada kepentingan dan mencari keuntungan bersama (win-win solution); (2) melakukan kegiatan penyelesaian masalah bersama; dan (3) masyarakat dan perusahaan HPH mencoba memerankan LSM dan pemerintah sebagai mediator; LSM dan pemerintah juga menempatkan diri sebagai pihak yang independen. Pihak masyarakat dan LSM justru meningkatkan intensitas tekanannya melalui gerakan sosial (social movements). Sedangkan pihak perusahaan HPH berusaha mencari dukungan-dukungan baru untuk meningkatkan kekuatannya melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah.

Dari Sengketa ke Gerakan Sosial

Sengketa sumberdaya lahan hutan antara masyarakat setempat dengan perusahaan HPH telah mengarah pada suatu bentuk gerakan sosial (social movement). Gerakan masyarakat tidak terorganisir, namun memperoleh kekuatan yang berasal dari organisasi di

luar masyarakat, yaitu LSM. Gerakan sosial yang terwujud mengandung karakteristik¹⁰ sebagai berikut (1) faktor yang memobilisasi gerakan dan yang menjadi keluhan cenderung berfokus pada isu-isu ekonomi, meskipun tidak seperti gerakan kelas pekerja (the working-class movement); (2) orientasi gerakan lebih pragmatis. Pola mobilisasi gerakan belum mengarah pada tindakan kekerasan (violence), melainkan lebih pada ketidakpatuhan (disobedience) pada keputusan-keputusan pemerintah; (3) Gerakan lebih cenderung

PETUNJUK MEMBUAT MAKALAH

bersifat lokal yang otonom, namun sudah mulai mengkaitkannya dengan organisasi lain (LSM) pada tingkat regional; (4) keterlibatan organisasi lain di luar masyarakat setempat mempunyai peran yang penting dalam membangun isu publik pada tingkat regional maupun nasional; (5) masyarakat dan organisasi luar tersebut mempunyai tujuannya masing-masing, namun dapat bekerjasama dalam berhadapan dengan pihak perusahaan PT. DRT dan pemerintah (Kanwil dan Dinas Kehutanan); (6) ideologi dari gerakan cenderung kabur, sedangkan identitas individu maupun identitas kolektif cenderung semakin nyata. Masyarakat mengidentifikasi diri sebagai kelompok lokal, kelompok tertindas, kelompok miskin, meskipun identitas tersebut lebih nyata diberikan oleh pihak luar (LSM) dari pada ungkapan masyarakat sendiri.

Mediasi dan negosiasi tetap relevan sebagai model penyelesaian sengketa yang terjadi. Berkembangnya gerakan sosial ini menuntut adanya mediator baru yang independen terhadap kedua pihak yang bersengketa.

C. PENUTUP

Proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa adalah kombinasi model mediasi dan negosiasi. Masyarakat memilih LSM sebagai pembela. Di pihak lain, perusahaan HPH menggunakan prosedur formal dan menempatkan pemerintah (Departemen Kehutanan, termasuk Dinas Kehutanan dan pemerintah daerah) sebagai mediator. Namun pemerintah lebih menempatkan diri sebagai pembela perusahaan HPH, sehingga masyarakatpun tidak menempatkan pemerintah sebagai mediator atau arbitrator.

Landasan hukum yang digunakan oleh masyarakat untuk klaim lahan adalah

PETUNJUK MEMBUAT MAKALAH

kesepakatan, bukan hukum adat. Sedangkan pihak perusahaan HPH mendasarkan diri pada SK-SK Menteri Kehutanan. Pada kasus sengketa yang dikaji ini peran pemerintah sebagai penyebab timbulnya sengketa tampak jelas, yaitu tidak menyampaikan informasi secara jelas dan benar baik lisan maupun tulisan.

Akibat LSM dan pemerintah tidak memainkan perannya sebagai mediator, maka pihak masyarakat (bersama LSM) telah meningkatkan intensitas tekanan terhadap perusahaan HPH dari protes menjadi gerakan sosial. Gejala yang muncul adalah eskalasi sengketa. Peningkatan intensitas tekanan tersebut menuntut adanya mediator baru yang independen terhadap kedua pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa yang bersifat win-win solution dan menjamin perdamaian jangka panjang belum terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Gokma Toni Parlindungan S, *Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Hakim Dalam Perkara Poligami Di Pengadilan Negeri Pasaman Sebagai Ceriminan Ius Constitutum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Gokma Toni Parlindungan S, *Pengisian Jabatan Perangkat Nagari Pemekaran Di Pasaman Barat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Ensiklopedia Of Journal, Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019,
- Harniwati, *Peralihan Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Jasmir, *Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Jumrawarsi Jumrawarsi, Neviyarni Suhaili, *Peran Seorang Guru Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Kondusif*, Ensiklopedia Education Review, Vol 2, No 3 (2020): Volume 2 No.3 Desember 2020
- Mia Siratni, *Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Ensiklopedia Of Journal, Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019,

PETUNJUK MEMBUAT MAKALAH

Remince, *Dimensi Hukum Pelanggaran Kecelakaan Lalu Dan Angkutan Jalan Lintas Di Indonesia*, Ensiklopedia Social Review, Volume 1, Nomor 2, 2019.

R Amin, B Nurdin, *Konflik Perwakafan Tanah Muhammadiyah di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Indonesia 2015-2019*, Soumatera Law Review, Volume 3, Nomor 1, 2020.